

STRATEGI TRANSFORMASI DIGITAL BIROKRASI MELALUI PENGUATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR

A.M. Yadisar

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Univesitas Kapuas Sintang, Jl. Y.C. Oevang Oeray No. 92,
Sintang, Indonesia, email: yadisar75@gmail.com

Abstract: *The digital transformation of the bureaucracy represents a systemic paradigm shift toward Digital-Era Governance, aimed at improving the quality of public services and government transparency. However, the implementation of the Electronic-Based Governance System (SPBE) in the Sintang Regency Local Government still faces challenges in the form of low digital literacy, a resistant organizational culture, and rampant sectoral ego (silo system). This descriptive qualitative study aims to analyze digital transformation strategies through the strengthening of human resource (HR) capacity among civil servants as the primary driving force. The results of the study indicate that the success of digitization is not determined by technological sophistication, but rather by the readiness of human resource capacity and changes in work culture within the Sintang Regency Local Government. From a public administration perspective, capacity building must be carried out in an integrated manner through competency mapping, upskilling and reskilling programs, and the implementation of knowledge management. Meanwhile, from a political standpoint, digital transformation serves as a strategic tool to strengthen the capacity of the Sintang Regency Government and its legitimacy through public trust. This study concludes that the Sintang Regency Government must demonstrate political commitment to harmonizing regulations and ensuring budgetary proportionality in order to fund the development of digital talent among civil servants within the Sintang Regency Government. Strong digital leadership is required to guide change management in order to realize a bureaucracy that is adaptive, professional, innovative, and oriented toward public values.*

Keywords: *Strategy; Digital Transformation; Civil Service Human Resource Capacity*

Abstrak: Transformasi digital birokrasi merupakan pergeseran paradigma sistemik menuju *Digital-Era Governance* yang bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik dan transparansi pemerintahan. Namun, implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang masih menghadapi tantangan berupa rendahnya literasi digital, budaya organisasi yang resistif, serta maraknya ego sektoral (*silo system*). Penelitian kualitatif deskriptif ini bertujuan untuk menganalisis strategi transformasi digital melalui penguatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) aparatur sebagai aktor penggerak utama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan digitalisasi tidak ditentukan oleh kecanggihan teknologi, melainkan oleh kesiapan kapasitas SDM dan perubahan budaya kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang. Dari perspektif administrasi publik, penguatan kapasitas harus dilakukan secara terpadu melalui pemetaan kompetensi, program *upskilling* dan *reskilling*, serta penerapan *knowledge management*. Sementara dalam argumen politik, transformasi digital merupakan instrumen strategis untuk memperkuat kapasitas Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang dan legitimasi Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang melalui kepercayaan publik (*public trust*). Penelitian ini menyimpulkan perlunya komitmen politik Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang dalam harmonisasi regulasi dan proporsionalitas anggaran guna mendanai pengembangan talenta digital aparatur di

Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang. Diperlukan kepemimpinan digital (*digital leadership*) yang kuat untuk mengawal manajemen perubahan demi mewujudkan birokrasi yang adaptif, profesional, inovatif, dan berorientasi pada nilai publik.

Kata Kunci: Strategi; Transformasi Digital; Kapasitas SDM Aparatur

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital pada era Revolusi Industri 4.0 dan Society 5.0 telah mengubah hampir seluruh aspek kehidupan, termasuk cara pemerintah menjalankan fungsi administrasi dan pelayanan publik. Integrasi teknologi digital, seperti kecerdasan buatan, komputasi awan, big data, dan *Internet of Things (IoT)*, mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih terbuka, cepat, dan berbasis data. Dalam perspektif politik, transformasi digital menjadi instrumen strategis bagi Pemerintah Daerah untuk memperkuat legitimasi pemerintahan melalui peningkatan kualitas pelayanan publik, transparansi, dan akuntabilitas. Sementara itu, dalam perspektif administrasi publik, perkembangan teknologi menuntut perubahan paradigma birokrasi dari sistem yang bersifat administratif dan prosedural menuju birokrasi yang adaptif, kolaboratif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat (Schwab, 2016).

Perubahan tersebut mendorong digitalisasi sektor publik sebagai suatu kebutuhan yang tidak dapat dihindari. Masyarakat kini mengharapkan pelayanan pemerintah yang cepat, mudah diakses, transparan, dan terintegrasi sebagaimana layanan yang diberikan sektor swasta. Digitalisasi tidak lagi dipahami sebatas penggunaan teknologi informasi, tetapi

merupakan proses transformasi tata kelola pemerintahan yang mampu meningkatkan efektivitas, efisiensi, serta kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi digital (Mergel et al., 2019). Dengan demikian, keberhasilan pemerintah dalam mengelola transformasi digital menjadi salah satu indikator penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Dalam konteks tersebut, transformasi digital birokrasi menjadi agenda strategis reformasi birokrasi di berbagai negara, termasuk Indonesia. Pemerintah Indonesia telah menetapkan transformasi digital melalui implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebagai arah kebijakan nasional untuk membangun birokrasi yang modern, efektif, dan akuntabel. Transformasi ini tidak hanya bertujuan mengubah proses administrasi secara elektronik, tetapi juga membangun budaya kerja baru yang lebih inovatif, kolaboratif, dan berorientasi pada hasil. Dari sudut pandang politik administrasi, transformasi digital merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara (Osborne, 2010).

Meskipun demikian, implementasi transformasi digital birokrasi di Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang masih menghadapi berbagai tantangan. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan digitalisasi belum berlangsung secara merata karena masih terdapat kesenjangan infrastruktur teknologi, rendahnya literasi digital aparatur, budaya organisasi yang masih resistif terhadap perubahan, serta belum optimalnya integrasi sistem pemerintahan digital. Kondisi tersebut menyebabkan implementasi SPBE di berbagai instansi belum mampu menghasilkan pelayanan publik yang sepenuhnya efektif dan terintegrasi (Rudianto, 2024; Dunggio et al., 2025).

Berbagai kendala tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan transformasi digital birokrasi tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan teknologi, tetapi sangat bergantung pada kapasitas sumber daya manusia aparatur di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang. Dalam perspektif administrasi publik, aparatur sipil negara merupakan aktor utama yang menentukan berhasil atau tidaknya implementasi kebijakan transformasi digital. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi digital, kemampuan adaptasi terhadap perubahan, kepemimpinan yang visioner, serta budaya kerja yang inovatif menjadi faktor fundamental dalam mendukung keberhasilan reformasi birokrasi digital. Penguatan kapasitas aparatur tidak hanya

meningkatkan kemampuan teknis dalam memanfaatkan teknologi, tetapi juga membangun pola pikir yang berorientasi pada inovasi, kolaborasi, dan pelayanan publik yang berkualitas (Saputra et al., 2025; Sarjito & Djati, 2025).

Berdasarkan kondisi tersebut, kajian mengenai strategi transformasi digital birokrasi melalui penguatan kapasitas SDM aparatur di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang menjadi sangat penting untuk dibahas. Fokus penelitian ini diarahkan pada identifikasi strategi yang mampu memperkuat kompetensi aparatur sebagai prasyarat utama keberhasilan transformasi digital birokrasi. Dengan demikian, transformasi digital tidak hanya dipandang sebagai modernisasi teknologi pemerintahan, tetapi sebagai proses reformasi administrasi publik yang menempatkan sumber daya manusia sebagai penggerak utama dalam mewujudkan birokrasi yang profesional, adaptif, inovatif, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena dinilai paling tepat dalam memahami secara mendalam fenomena strategis yang berkaitan dengan transformasi digital birokrasi melalui penguatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) aparatur di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang. Pendekatan kualitatif deskriptif tidak bertujuan

untuk menguji hipotesis ataupun menghasilkan generalisasi statistik, melainkan untuk mengeksplorasi makna, konteks, serta dinamika yang terjadi dalam proses transformasi birokrasi digital sebagai bagian dari reformasi administrasi publik. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai bagaimana strategi penguatan kapasitas SDM aparatur dirancang, diimplementasikan, serta memengaruhi keberhasilan transformasi digital birokrasi (Creswell & Poth, 2018).

Dalam perspektif Ilmu Administrasi Publik, transformasi digital birokrasi merupakan proses perubahan organisasi yang bersifat multidimensional, karena melibatkan aspek kebijakan, tata kelola pemerintahan, struktur organisasi, kepemimpinan, budaya kerja, kompetensi aparatur, serta pemanfaatan teknologi digital dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Transformasi digital tidak hanya dimaknai sebagai penerapan teknologi informasi, tetapi juga sebagai perubahan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia agar mampu beradaptasi dengan tuntutan pemerintahan digital (*digital government*). Oleh karena itu, pendekatan deskriptif kualitatif memungkinkan peneliti menangkap kompleksitas tersebut secara utuh melalui pemahaman terhadap berbagai faktor yang memengaruhi keberhasilan strategi transformasi digital birokrasi

dari berbagai perspektif yang saling berkaitan (Mergel et al., 2019).

Lokasi penelitian ditentukan secara purposif, yaitu pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang yang sedang atau telah melaksanakan transformasi digital melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta program pengembangan kapasitas SDM aparatur di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada relevansi empiris terhadap fokus penelitian, yaitu bagaimana strategi transformasi digital birokrasi dilaksanakan melalui peningkatan kapasitas aparatur sebagai aktor utama dalam penyelenggaraan pemerintahan digital. Subjek penelitian terdiri atas pejabat struktural, pejabat pengelola kepegawaian, aparatur sipil negara (ASN), pengelola SPBE, serta pihak-pihak lain yang memiliki keterlibatan langsung dalam proses transformasi digital birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang. Penentuan informan dilakukan menggunakan teknik purposive sampling, dengan mempertimbangkan pengalaman, pengetahuan, serta keterlibatan mereka dalam implementasi transformasi digital birokrasi (Sugiyono, 2023).

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama, yaitu wawancara mendalam (*in-depth interview*), observasi, dan studi dokumentasi. Wawancara digunakan untuk memperoleh informasi mengenai strategi pengembangan

kapasitas SDM aparatur, kompetensi digital, bentuk pelatihan yang diberikan, hambatan implementasi transformasi digital, serta berbagai kebijakan yang mendukung proses perubahan birokrasi. Observasi dilakukan untuk memahami secara langsung kondisi organisasi, pola kerja aparatur, pemanfaatan teknologi digital dalam proses administrasi pemerintahan, serta interaksi antarpegawai dalam mendukung transformasi birokrasi digital. Sementara itu, studi dokumentasi dilakukan dengan menelaah berbagai dokumen resmi, seperti kebijakan SPBE, dokumen reformasi birokrasi, standar operasional prosedur (SOP), laporan pengembangan kompetensi ASN, serta berbagai regulasi yang berkaitan dengan penguatan kapasitas SDM aparatur di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang.

Teknik analisis data menggunakan model analisis interaktif yang dikembangkan oleh Miles, Huberman, dan Saldaña (2014), yang meliputi tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Reduksi data dilakukan dengan menyeleksi berbagai informasi yang berkaitan dengan strategi transformasi digital birokrasi, kompetensi digital aparatur, pengembangan kapasitas SDM, kepemimpinan, budaya organisasi, serta implementasi kebijakan digital di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk uraian

deskriptif, matriks, dan kategorisasi tematik sehingga memudahkan proses interpretasi. Tahap akhir dilakukan melalui penarikan kesimpulan secara induktif berdasarkan pola hubungan antartemuan yang muncul selama proses penelitian.

Untuk menjaga validitas dan kredibilitas data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai informan yang memiliki posisi dan peran berbeda dalam implementasi transformasi digital birokrasi. Sementara itu, triangulasi metode dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi sehingga diperoleh data yang konsisten dan dapat dipercaya. Selain itu, validitas data juga diperkuat melalui member check, yaitu mengonfirmasi kembali hasil interpretasi peneliti kepada informan utama agar sesuai dengan pengalaman dan kondisi empiris yang mereka sampaikan (Lincoln & Guba, 1985).

Secara epistemologis, penelitian kualitatif dalam Ilmu Administrasi Publik memandang transformasi digital birokrasi sebagai realitas sosial yang dibentuk melalui interaksi antara kebijakan, organisasi, teknologi, dan perilaku aparatur. Dengan demikian, keberhasilan transformasi digital tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi, tetapi juga dipengaruhi oleh kapasitas sumber daya manusia, budaya organisasi, kepemimpinan,

serta kemampuan birokrasi dalam beradaptasi terhadap perubahan. Oleh karena itu, penelitian ini tidak bertujuan menghasilkan model yang bersifat universal, melainkan membangun pemahaman yang mendalam mengenai strategi penguatan kapasitas SDM aparatur sebagai faktor kunci dalam mendukung keberhasilan transformasi digital birokrasi.

Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi teoritis maupun praktis dalam pengembangan Ilmu Administrasi Publik, khususnya pada kajian transformasi digital birokrasi dan manajemen sumber daya manusia sektor publik. Selain itu, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang dalam merumuskan kebijakan pengembangan kompetensi aparatur yang adaptif terhadap perkembangan teknologi digital sehingga mampu mewujudkan birokrasi yang profesional, inovatif, responsif, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perkembangan teknologi digital pada era Revolusi Industri 4.0 dan Society 5.0 telah membawa perubahan yang sangat signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan dan administrasi publik. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi,

seperti *artificial intelligence* (AI), *big data*, *cloud computing*, *Internet of Things* (IoT), dan analisis data digital telah mengubah pola interaksi antara pemerintah dengan masyarakat menjadi lebih cepat, terbuka, dan berbasis data. Menurut Schwab (2016), Revolusi Industri 4.0 ditandai oleh terjadinya integrasi antara teknologi digital, sistem fisik, dan manusia yang menghasilkan perubahan mendasar terhadap tata kelola organisasi, ekonomi, maupun pemerintahan. Sementara itu, konsep Society 5.0 yang diperkenalkan oleh pemerintah Jepang menempatkan manusia sebagai pusat inovasi teknologi, sehingga pemanfaatan teknologi digital diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pelayanan yang lebih efektif, efisien, dan inklusif (Fukuyama, 2018).

Perubahan tersebut turut memengaruhi paradigma administrasi publik. Pemerintah tidak lagi diposisikan sebagai satu-satunya aktor yang menjalankan fungsi pelayanan secara birokratis, melainkan dituntut menjadi organisasi yang adaptif, kolaboratif, inovatif, dan responsif terhadap dinamika lingkungan strategis. Dalam perspektif politik administrasi, kemampuan pemerintah dalam memanfaatkan teknologi digital menjadi salah satu instrumen untuk memperkuat legitimasi negara melalui peningkatan kualitas pelayanan publik, transparansi penyelenggaraan pemerintahan, serta akuntabilitas pengambilan keputusan (Osborne, 2010). Oleh karena itu, transformasi

digital bukan hanya merupakan perubahan teknologi, tetapi juga merupakan perubahan paradigma penyelenggaraan pemerintahan yang menempatkan masyarakat sebagai pusat pelayanan (*citizen centered government*).

Perubahan lingkungan strategis tersebut menyebabkan meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap modernisasi tata kelola pemerintahan. Masyarakat saat ini menginginkan pelayanan publik yang cepat, sederhana, transparan, mudah diakses, serta dapat diperoleh kapan saja melalui berbagai *platform* digital. Standar pelayanan yang sebelumnya hanya mengandalkan prosedur administratif konvensional tidak lagi mampu memenuhi ekspektasi masyarakat digital yang telah terbiasa dengan layanan sektor swasta berbasis teknologi. Kondisi ini mendorong pemerintah untuk melakukan modernisasi birokrasi melalui pemanfaatan teknologi digital sebagai bagian dari upaya meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan (Mergel et al., 2019).

Dalam perspektif administrasi publik, modernisasi birokrasi merupakan bagian dari proses reformasi administrasi yang bertujuan meningkatkan kapasitas organisasi pemerintah agar mampu menghasilkan pelayanan publik yang berkualitas. Reformasi birokrasi tidak lagi hanya berorientasi pada penyederhanaan struktur organisasi atau perubahan prosedur administrasi, tetapi juga diarahkan pada transformasi tata

kelola pemerintahan yang berbasis digital, inovatif, kolaboratif, dan berorientasi pada hasil (Dunleavy et al., 2006). Dengan demikian, transformasi digital birokrasi menjadi salah satu instrumen utama dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif sekaligus memperkuat prinsip-prinsip *good governance* melalui peningkatan transparansi, partisipasi publik, efisiensi, dan akuntabilitas (OECD, 2020).

Transformasi digital birokrasi pada dasarnya merupakan proses perubahan menyeluruh terhadap cara Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang menjalankan fungsi administrasi, pengambilan keputusan, pengelolaan data, serta penyelenggaraan pelayanan publik dengan memanfaatkan teknologi digital secara terintegrasi. Transformasi ini tidak hanya terbatas pada digitalisasi dokumen atau penggunaan aplikasi elektronik, tetapi juga mencakup perubahan budaya organisasi, pola kerja, kompetensi aparatur, hingga model kepemimpinan yang mampu beradaptasi terhadap perkembangan teknologi (Vial, 2019). Oleh karena itu, keberhasilan transformasi digital tidak dapat diukur hanya dari banyaknya aplikasi yang dikembangkan pemerintah, melainkan dari sejauh mana teknologi tersebut mampu menciptakan nilai publik (*public value*), meningkatkan kualitas pelayanan, mempercepat proses birokrasi, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Sebagai bentuk komitmen dalam mempercepat transformasi digital, Pemerintah Indonesia telah menetapkan berbagai kebijakan strategis yang menjadi landasan pembangunan pemerintahan digital. Salah satu kebijakan utama adalah Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), yang bertujuan menciptakan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan terintegrasi melalui pemanfaatan teknologi informasi. SPBE menjadi kerangka nasional dalam mengintegrasikan proses bisnis pemerintahan, layanan publik, manajemen data, serta pengelolaan sumber daya digital di seluruh instansi pemerintah (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018). Selain itu, pemerintah juga memperkuat arah transformasi digital melalui Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional 2020–2024 yang menempatkan transformasi digital sebagai salah satu agenda prioritas reformasi birokrasi, serta Kebijakan Satu Data Indonesia berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 untuk mewujudkan tata kelola data yang akurat, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan dalam proses perumusan kebijakan publik. Berbagai kebijakan tersebut menunjukkan bahwa transformasi digital telah menjadi agenda politik nasional dalam membangun birokrasi yang modern, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan publik. Namun demikian,

keberhasilan implementasi kebijakan tersebut tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan regulasi maupun infrastruktur teknologi, melainkan sangat dipengaruhi oleh kesiapan organisasi birokrasi dan kapasitas sumber daya manusia aparatur sebagai pelaksana utama transformasi digital (Rudianto, 2024; Sarjito & Djati, 2025).

Meskipun pemerintah telah menetapkan transformasi digital sebagai agenda strategis nasional, implementasinya di Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang masih menghadapi berbagai tantangan yang menyebabkan capaian transformasi digital birokrasi belum berlangsung secara optimal. Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang telah mengembangkan beragam aplikasi pelayanan publik berbasis digital, namun implementasinya masih menunjukkan tingkat kematangan yang beragam. Sebagian instansi telah berhasil mengintegrasikan layanan secara elektronik, sementara sebagian lainnya masih berada pada tahap digitalisasi administratif yang belum sepenuhnya mampu menghasilkan pelayanan publik yang terintegrasi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa transformasi digital birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang masih berada pada fase transisi dari digitalisasi proses administrasi menuju transformasi tata kelola pemerintahan secara menyeluruh (Mergel et al., 2019). Fenomena tersebut juga mengindikasikan bahwa keberhasilan

transformasi digital tidak cukup diukur dari banyaknya aplikasi yang dikembangkan, tetapi harus dilihat dari kemampuan birokrasi dalam menciptakan pelayanan yang efektif, efisien, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat (Vial, 2019).

Dalam perspektif administrasi publik, transformasi digital merupakan proses perubahan sistemik yang melibatkan aspek kelembagaan, proses bisnis, sumber daya manusia, hingga budaya organisasi. Oleh karena itu, implementasi transformasi digital di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang masih menghadapi berbagai permasalahan yang saling berkaitan. Salah satu tantangan utama adalah belum meratanya infrastruktur digital, khususnya pada pemerintah daerah yang memiliki keterbatasan akses jaringan internet, pusat data, maupun sarana teknologi informasi. Ketimpangan infrastruktur tersebut menyebabkan kualitas implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) belum dapat berjalan secara merata di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang sehingga berpengaruh terhadap kualitas pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat.

Selain persoalan infrastruktur, transformasi digital birokrasi juga menghadapi permasalahan integrasi sistem informasi antarinstansi pemerintah. Selama ini berbagai instansi di Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang masih mengembangkan aplikasi secara sektoral sehingga menghasilkan sistem

yang berjalan sendiri-sendiri (silo system). Akibatnya, pertukaran data antarinstansi menjadi tidak optimal, proses pelayanan publik masih berulang, dan efisiensi administrasi belum sepenuhnya tercapai. Padahal, karakteristik utama pemerintahan digital adalah kemampuan membangun interoperabilitas data dan integrasi layanan sehingga masyarakat dapat memperoleh pelayanan secara mudah melalui sistem yang saling terhubung. Oleh karena itu, implementasi kebijakan SPBE dan Satu Data menjadi sangat penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintah daerah yang terintegrasi dan berbasis data.

Permasalahan berikutnya berkaitan dengan aspek regulasi. Perkembangan teknologi digital berlangsung jauh lebih cepat dibandingkan proses pembentukan kebijakan publik. Kondisi ini menyebabkan berbagai regulasi sering kali belum mampu mengakomodasi kebutuhan transformasi digital yang berkembang secara dinamis. Di sisi lain, masih terdapat tumpang tindih kebijakan, lemahnya koordinasi antarinstansi, serta belum optimalnya harmonisasi regulasi yang mengatur tata kelola data, keamanan informasi, maupun interoperabilitas sistem pemerintahan digital. Dari perspektif politik administrasi, kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan transformasi digital tidak hanya bergantung pada inovasi teknologi, tetapi juga pada kapasitas Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang dalam

membangun kebijakan yang adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis.

Tantangan lain yang tidak kalah penting adalah budaya organisasi birokrasi yang masih cenderung mempertahankan pola kerja konvensional. Selama bertahun-tahun birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang berkembang dengan karakteristik yang hierarkis, prosedural, dan berorientasi pada kepatuhan administratif. Karakteristik tersebut sering kali menimbulkan resistensi terhadap inovasi dan perubahan sehingga proses transformasi digital berjalan lebih lambat dibandingkan perkembangan teknologi itu sendiri. Perubahan menuju birokrasi digital pada dasarnya menuntut perubahan pola pikir aparatur agar lebih terbuka terhadap inovasi, kolaborasi lintas sektor, serta pengambilan keputusan berbasis data. Oleh sebab itu, transformasi digital sesungguhnya merupakan transformasi budaya organisasi, bukan sekadar transformasi teknologi (Osborne, 2010).

Keberhasilan perubahan budaya organisasi juga sangat dipengaruhi oleh kualitas kepemimpinan birokrasi di Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang. Pemimpin memiliki peran strategis dalam membangun visi transformasi, menciptakan budaya inovasi, mengelola perubahan organisasi, serta memastikan seluruh sumber daya bergerak menuju tujuan yang sama. Kepemimpinan yang masih berorientasi pada pengendalian

administratif cenderung menghambat lahirnya inovasi digital, sedangkan kepemimpinan transformasional mampu menciptakan lingkungan kerja yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan perubahan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, digital leadership menjadi salah satu prasyarat penting dalam mewujudkan transformasi birokrasi yang berkelanjutan.

Di antara berbagai tantangan tersebut, kesiapan sumber daya manusia aparatur di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang merupakan faktor yang paling menentukan keberhasilan transformasi digital birokrasi. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa banyak program digitalisasi pemerintahan tidak mengalami kegagalan karena keterbatasan teknologi, melainkan karena rendahnya kompetensi digital aparatur, minimnya literasi digital, kurangnya pelatihan yang kontekstual, serta masih kuatnya resistensi terhadap perubahan organisasi. Aparatur sipil negara tidak hanya dituntut mampu mengoperasikan teknologi digital, tetapi juga harus memiliki kemampuan berpikir analitis, beradaptasi terhadap perubahan, bekerja secara kolaboratif, serta menghasilkan inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Dengan kata lain, teknologi hanyalah instrumen, sedangkan aparatur merupakan aktor utama yang menentukan berhasil atau tidaknya transformasi birokrasi digital (Sarjito & Djati, 2025).

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa transformasi digital birokrasi tidak dapat dipisahkan dari upaya penguatan kapasitas sumber daya manusia aparatur di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang. Dalam perspektif administrasi publik, kapasitas aparatur merupakan modal institusional yang menentukan kemampuan organisasi pemerintah dalam merancang kebijakan, mengelola perubahan, memanfaatkan teknologi, serta menghasilkan pelayanan publik yang berkualitas. Oleh karena itu, strategi transformasi digital yang hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur teknologi tanpa diikuti pengembangan kompetensi aparatur berpotensi menghasilkan digitalisasi yang bersifat administratif semata. Sebaliknya, transformasi digital yang didukung oleh aparatur yang kompeten, adaptif, inovatif, dan memiliki pola pikir digital akan mampu menciptakan birokrasi yang profesional, responsif, dan berorientasi pada penciptaan nilai publik. Berdasarkan argumentasi tersebut, penguatan kapasitas SDM aparatur perlu ditempatkan sebagai inti strategi transformasi digital birokrasi, bukan sekadar sebagai faktor pendukung implementasi kebijakan.

Dalam perspektif administrasi publik, keberhasilan transformasi digital birokrasi pada dasarnya ditentukan oleh kapasitas organisasi dalam mengelola perubahan. Salah satu elemen utama dari kapasitas tersebut adalah sumber daya manusia

aparatur sebagai pelaksana kebijakan sekaligus penggerak utama penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang. Teknologi digital hanya berfungsi sebagai alat, sedangkan efektivitas pemanfaatannya sangat dipengaruhi oleh kemampuan aparatur dalam mengoperasikan, mengelola, dan mengembangkan inovasi berbasis teknologi. Oleh karena itu, penguatan kapasitas SDM aparatur di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang tidak dapat lagi dipandang sebagai program pendukung reformasi birokrasi, melainkan sebagai strategi utama yang menentukan keberhasilan transformasi digital pemerintahan. Pendekatan ini sejalan dengan konsep *capacity building* yang dikemukakan Grindle (1997), bahwa peningkatan kapasitas harus dilakukan secara terpadu pada tingkat individu, organisasi, dan sistem agar mampu menghasilkan perubahan kelembagaan yang berkelanjutan.

Konsep kapasitas SDM aparatur dalam birokrasi digital di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang tidak lagi terbatas pada peningkatan kemampuan teknis penggunaan perangkat teknologi informasi. Aparatur dituntut memiliki seperangkat kompetensi baru yang mampu menjawab dinamika pemerintahan digital. Kompetensi tersebut mencakup literasi digital, kompetensi digital, kemampuan beradaptasi terhadap perubahan, kolaborasi lintas sektor, kemampuan berpikir inovatif, serta digital mindset yang menjadikan teknologi sebagai

bagian dari proses penciptaan nilai publik. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa paradigma pengembangan SDM birokrasi telah bergeser dari pendekatan administratif menuju pengembangan kompetensi yang bersifat strategis, adaptif, dan berorientasi pada inovasi (OECD, 2021).

Literasi digital menjadi kompetensi dasar yang harus dimiliki aparatur di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang dalam menghadapi transformasi birokrasi. Literasi digital tidak hanya dimaknai sebagai kemampuan menggunakan perangkat digital, tetapi juga mencakup kemampuan mencari, mengelola, mengevaluasi, serta memanfaatkan informasi secara kritis, etis, dan bertanggung jawab dalam proses pengambilan keputusan. Selanjutnya, kompetensi digital merupakan kemampuan yang lebih luas, yaitu mengintegrasikan teknologi digital dalam proses kerja untuk meningkatkan produktivitas organisasi, efektivitas pelayanan publik, serta kualitas tata kelola pemerintah daerah. Aparatur juga dituntut memiliki kemampuan adaptabilitas karena perubahan teknologi berlangsung sangat cepat sehingga pola kerja birokrasi harus mampu menyesuaikan diri terhadap perkembangan lingkungan strategis. Selain itu, kemampuan kolaborasi menjadi semakin penting karena penyelenggaraan pemerintahan digital menuntut sinergi antarinstansi, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat

dalam menghasilkan inovasi pelayanan publik (Mergel et al., 2019).

Kompetensi lain yang tidak kalah penting adalah kemampuan berinovasi dan membangun digital mindset. Inovasi dalam birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang bukan sekadar menghasilkan aplikasi baru, melainkan kemampuan menciptakan solusi pelayanan publik yang lebih sederhana, efektif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Sementara itu, digital mindset merupakan pola pikir yang memandang teknologi sebagai bagian dari strategi organisasi untuk menciptakan perubahan, bukan sekadar alat pendukung pekerjaan administratif. Aparatur yang memiliki digital mindset akan lebih terbuka terhadap perubahan, berani melakukan eksperimen, mampu memanfaatkan data sebagai dasar pengambilan keputusan, serta menjadikan pembelajaran berkelanjutan sebagai bagian dari budaya kerja organisasi. Dengan demikian, transformasi digital membutuhkan perubahan kompetensi sekaligus perubahan pola pikir aparatur sebagai fondasi utama reformasi birokrasi.

Hubungan antara kapasitas SDM dengan keberhasilan transformasi digital birokrasi menunjukkan keterkaitan yang sangat erat. Berbagai penelitian menegaskan bahwa organisasi publik yang memiliki aparatur dengan kompetensi digital yang baik cenderung lebih

cepat mengadopsi inovasi, mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta menghasilkan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan akuntabel (Sarjito & Djati, 2025; Saputra et al., 2025). Sebaliknya, rendahnya kapasitas aparatur menyebabkan berbagai investasi teknologi tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan kinerja organisasi. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa keberhasilan transformasi digital lebih ditentukan oleh kesiapan manusia dibandingkan oleh kecanggihan teknologi yang dimiliki.

Atas dasar tersebut, diperlukan strategi penguatan kapasitas SDM aparatur di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang yang dirancang secara sistematis dan berkelanjutan. Strategi pertama adalah melakukan pemetaan kebutuhan kompetensi (*competency mapping*) sesuai dengan tuntutan jabatan dan perkembangan teknologi digital sehingga pengembangan SDM dilakukan berdasarkan kebutuhan organisasi, bukan sekadar memenuhi target administratif. Strategi berikutnya adalah penyelenggaraan program *upskilling* dan *reskilling* untuk meningkatkan maupun memperbarui kompetensi aparatur di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang agar tetap relevan dengan perkembangan teknologi. Upaya tersebut perlu diperkuat melalui pendidikan dan pelatihan yang berbasis kompetensi, sertifikasi profesional, serta pengembangan

sistem pembelajaran berkelanjutan (*continuous learning*) yang memungkinkan aparatur terus meningkatkan kapasitasnya sepanjang karier.

Selain pengembangan individu, organisasi juga perlu membangun sistem *knowledge management* yang mampu mendokumentasikan, mengelola, dan mendistribusikan pengetahuan birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang. Melalui sistem tersebut, pengalaman, inovasi, dan praktik terbaik dapat menjadi sumber pembelajaran bersama sehingga mempercepat proses transformasi organisasi. Pada saat yang sama, kepemimpinan digital (*digital leadership*) memiliki peran penting dalam mengarahkan perubahan organisasi. Pemimpin tidak hanya dituntut memahami teknologi, tetapi juga mampu membangun visi transformasi, mendorong kolaborasi, mengelola resistensi terhadap perubahan, serta menciptakan budaya inovasi yang mendukung implementasi birokrasi digital. Strategi tersebut perlu dilengkapi dengan pendekatan *change management* untuk memastikan bahwa perubahan tidak hanya terjadi pada aspek teknologi, tetapi juga menyentuh perilaku, nilai, dan budaya kerja aparatur.

Implementasi strategi penguatan kapasitas SDM tentunya dipengaruhi oleh berbagai faktor pendukung dan penghambat. Dukungan regulasi, komitmen politik pemerintah, anggaran yang memadai,

perkembangan infrastruktur digital, kepemimpinan yang visioner, serta budaya organisasi yang adaptif merupakan faktor yang mampu mempercepat transformasi digital birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang. Sebaliknya, resistensi terhadap perubahan, keterbatasan kompetensi digital aparatur, lemahnya koordinasi antarinstansi, serta rendahnya komitmen organisasi menjadi hambatan yang masih sering ditemukan dalam implementasi kebijakan transformasi digital di Indonesia. Oleh karena itu, strategi penguatan kapasitas SDM di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang harus dirancang secara komprehensif dengan mempertimbangkan keterkaitan antara aspek individu, organisasi, dan sistem pemerintahan.

Apabila strategi tersebut dapat diimplementasikan secara konsisten, maka transformasi digital birokrasi akan memberikan dampak yang luas terhadap peningkatan kinerja organisasi pemerintah. Birokrasi akan menjadi lebih efisien dalam menjalankan proses administrasi, lebih cepat dalam memberikan pelayanan, lebih akurat dalam menghasilkan kebijakan berbasis data, serta lebih adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis. Dari perspektif administrasi publik, kondisi tersebut akan memperkuat penerapan prinsip-prinsip *good governance* melalui meningkatnya transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi,

partisipasi masyarakat, dan kualitas pelayanan publik. Pada akhirnya, transformasi digital tidak hanya menghasilkan modernisasi sistem pemerintahan, tetapi juga meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi negara sebagai penyelenggara pelayanan publik.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa transformasi digital birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang merupakan proses perubahan yang bersifat multidimensional sehingga keberhasilannya tidak cukup hanya ditopang oleh pembangunan teknologi maupun penyempurnaan regulasi. Faktor yang paling menentukan adalah kemampuan Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang dalam membangun aparatur yang memiliki kompetensi digital, adaptif terhadap perubahan, inovatif, serta mampu bekerja secara kolaboratif dalam lingkungan birokrasi modern. Dengan demikian, strategi transformasi digital birokrasi melalui penguatan kapasitas SDM aparatur di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang menjadi pendekatan yang paling relevan untuk menjawab berbagai tantangan reformasi birokrasi. Berangkat dari argumentasi tersebut, penelitian ini difokuskan untuk menganalisis strategi penguatan kapasitas SDM aparatur sebagai faktor utama dalam mendukung keberhasilan transformasi digital birokrasi, sekaligus merumuskan strategi yang dapat diterapkan untuk mewujudkan birokrasi digital yang efektif,

profesional, adaptif, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik.

Perkembangan transformasi digital birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang dalam beberapa tahun terakhir telah menjadi perhatian utama berbagai kalangan akademisi maupun praktisi administrasi publik. Berbagai penelitian umumnya menitikberatkan pembahasan pada aspek implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), digitalisasi pelayanan publik, pembangunan infrastruktur teknologi informasi, maupun evaluasi kebijakan reformasi birokrasi. Kajian tersebut memberikan kontribusi yang penting dalam menjelaskan bagaimana teknologi dimanfaatkan untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang. Akan tetapi, sebagian besar penelitian masih menempatkan teknologi sebagai faktor utama keberhasilan transformasi digital, sementara aspek kapasitas sumber daya manusia aparatur sering kali hanya diposisikan sebagai faktor pendukung. Padahal, berbagai pengalaman implementasi transformasi digital di berbagai negara menunjukkan bahwa investasi teknologi yang besar tidak selalu menghasilkan perubahan birokrasi apabila tidak diikuti oleh kesiapan organisasi dan aparatur yang mampu mengelola perubahan tersebut (Vial, 2019; OECD, 2021).

Dalam perspektif administrasi publik, transformasi digital sesungguhnya merupakan proses perubahan kelembagaan (*institutional change*) yang melibatkan interaksi antara kebijakan, organisasi, teknologi, kepemimpinan, serta perilaku aparatur. Oleh karena itu, keberhasilan transformasi digital di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang tidak dapat dijelaskan hanya melalui pendekatan teknologi (*technology-driven approach*), tetapi harus dipahami sebagai proses administrasi yang memerlukan penguatan kapasitas organisasi secara menyeluruh. Pendekatan tersebut sejalan dengan teori *capacity building* yang menekankan bahwa peningkatan kapasitas harus dilakukan pada tingkat individu, organisasi, dan sistem secara simultan agar perubahan dapat berlangsung secara berkelanjutan (Grindle, 1997). Dengan demikian, pembangunan infrastruktur digital tanpa diikuti peningkatan kompetensi aparatur berpotensi menghasilkan digitalisasi yang bersifat administratif, tetapi belum mampu menciptakan transformasi birokrasi secara substantif.

Dari perspektif politik administrasi, transformasi digital juga merupakan bentuk komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang dalam memperkuat kapasitas pemerintah daerah untuk memenuhi tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang semakin berkualitas. Keberhasilan Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang dalam

mengimplementasikan transformasi digital tidak hanya berdampak pada meningkatnya efisiensi birokrasi, tetapi juga menjadi indikator kemampuan pemerintah daerah dalam membangun kepercayaan publik melalui tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif. Sebaliknya, kegagalan transformasi digital dapat memperlebar kesenjangan pelayanan publik, menurunkan legitimasi kebijakan pemerintah, serta menghambat pencapaian tujuan reformasi birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang. Oleh karena itu, transformasi digital harus dipahami sebagai agenda politik sekaligus agenda administrasi publik yang memerlukan dukungan kelembagaan, kepemimpinan, dan sumber daya manusia yang memadai.

Apabila dikaitkan dengan kondisi birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang, masih ditemukan berbagai persoalan yang menunjukkan adanya kesenjangan antara arah kebijakan transformasi digital dengan kapasitas implementasinya. Berbagai instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang telah memiliki sistem digital yang relatif memadai, namun belum seluruh aparatur mampu memanfaatkan teknologi tersebut secara optimal dalam mendukung proses kerja maupun pelayanan publik. Kesenjangan kompetensi digital, rendahnya budaya inovasi, terbatasnya program pengembangan kapasitas yang berkelanjutan, serta belum optimalnya

manajemen pengetahuan menyebabkan transformasi digital belum sepenuhnya menghasilkan perubahan kinerja birokrasi secara signifikan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tantangan utama transformasi digital di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang bukan lagi terletak pada ketersediaan teknologi, tetapi pada kemampuan organisasi dalam mengembangkan aparatur yang adaptif terhadap perubahan.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini memiliki posisi yang berbeda dibandingkan penelitian terdahulu. Penelitian ini tidak hanya mengkaji implementasi transformasi digital birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang dari aspek kebijakan atau teknologi, tetapi menempatkan penguatan kapasitas SDM aparatur sebagai variabel strategis yang menentukan keberhasilan transformasi digital birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang. Pendekatan ini memadukan perspektif administrasi publik, teori *capacity building*, dan konsep transformasi digital dalam menganalisis hubungan antara pengembangan kompetensi aparatur dengan efektivitas reformasi birokrasi digital. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi konseptual dalam pengembangan kajian administrasi publik, sekaligus memberikan rekomendasi praktis bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang dalam merumuskan strategi pengembangan kapasitas aparatur

yang lebih adaptif terhadap tuntutan pemerintahan digital.

Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini berupaya menghasilkan sintesis strategi transformasi digital birokrasi yang tidak hanya berorientasi pada pembangunan infrastruktur teknologi, tetapi juga pada pengembangan kompetensi, budaya organisasi, kepemimpinan digital, serta sistem pembelajaran berkelanjutan bagi aparatur sipil negara. Strategi tersebut diharapkan mampu menjadi model penguatan kapasitas SDM yang mendukung terwujudnya birokrasi digital di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang yang profesional, inovatif, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu administrasi publik, tetapi juga mendukung pencapaian agenda reformasi birokrasi dan pembangunan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, serta berlandaskan prinsip-prinsip *good governance*.

KESIMPULAN DAN SARAN

Transformasi digital birokrasi dalam lanskap tata kelola pemerintahan modern bukan lagi sekadar pilihan operasional, melainkan sebuah keniscayaan paradigma yang menggeser tata kelola konvensional menuju era Digital-Era *Governance*. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan dari perspektif

administrasi publik bahwa esensi keberhasilan transformasi ini tidak terletak pada kompleksitas teknologi yang diadopsi ataupun kuantitas aplikasi pelayanan publik yang diluncurkan, melainkan pada kapasitas adopsi institusional yang bertumpu pada sumber daya manusia (SDM) aparatur di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang sebagai aktor utamanya. Kegagalan dalam mengintegrasikan sistem informasi pemerintahan digital di Pemerintahan Daerah Kabupaten Sintang yang selama ini terjebak dalam egosentrisme *silo system* bersumber langsung dari rendahnya literasi digital, minimnya pelatihan kontekstual, serta kuatnya resistensi budaya organisasi yang hierarkis-prosedural terhadap perubahan. Secara fundamental, pendekatan *capacity building* yang komprehensif pada aspek individu, kelembagaan, dan sistemik menjadi prasyarat mutlak untuk melahirkan aparatur yang memiliki digital mindset guna menciptakan nilai publik (*public value*) yang optimal. Dalam dimensi argumentasi politik, ketidaksiapan kapasitas birokrasi ini berimplikasi langsung terhadap penurunan kapasitas Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang dalam mempertahankan legitimasi dan kepercayaan masyarakat (*public trust*). Manifestasi kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Kebijakan Satu Data di Kabupaten Sintang pada hakikatnya merupakan instrumen politik strategis

untuk memperkuat akuntabilitas dan transparansi Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang. Ketika aparatur di lapangan gagal mengeksekusi visi digital tersebut akibat keterbatasan kompetensi, terjadi disparitas antara komitmen politik yang dicanangkan pemerintah Daerah Kabupaten Sintang dengan realitas pelayanan publik yang diterima konstituen. Kondisi ini berpotensi mendegradasi muruah Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang di mata publik. Oleh karena itu, diperlukan penyelarasan yang kuat antara kemauan politik (*political will*) pemegang kekuasaan dengan reformasi budaya internal birokrasi agar modernisasi ini tidak sekadar menjadi kosmetik administratif, melainkan instrumen substansial dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Berangkat dari kesimpulan tersebut, studi ini merumuskan beberapa saran strategis yang saling berkelanjutan. Pertama, pada tataran administrasi publik dan manajemen talenta, Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang harus segera mereorientasi arah pengembangan kompetensi ASN dengan melakukan pemetaan kebutuhan digital (*competency mapping*) yang berbasis data riil. Program penajaman keahlian melalui *upskilling* dan *reskilling* tidak boleh lagi bersifat formalitas-administratif, melainkan harus diintegrasikan ke dalam sistem pembelajaran berkelanjutan (*continuous learning*) yang didukung oleh manajemen pengetahuan (*knowledge*

management) untuk mendokumentasikan inovasi organisasi. Lebih lanjut, pendekatan manajemen perubahan (*change management*) wajib diterapkan oleh setiap pimpinan instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang melalui model kepemimpinan digital (*digital leadership*) yang visioner demi mengikis resistensi dan menanamkan budaya kerja kolaboratif yang adaptif terhadap dinamika eksternal. Kedua, dari sudut pandang kebijakan dan politik anggaran, otoritas politik perlu segera melakukan harmonisasi dan sinkronisasi regulasi guna meruntuhkan tumpang tindih kebijakan yang menghambat interoperabilitas data antarinstitusi. Secara politik, komitmen penganggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang harus direformulasi secara proporsional, di mana investasi tidak lagi difokuskan secara timpang pada pengadaan infrastruktur fisik atau perangkat keras teknologi semata, melainkan dialokasikan secara berkeadilan untuk pembangunan kapasitas talenta digital aparatur secara merata, khususnya pada instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang yang memiliki keterbatasan akses. Dengan menyelaraskan penguatan kapasitas SDM aparatur dan konsistensi arah kebijakan politik, transformasi digital birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang akan mampu menghasilkan sistem pemerintahan yang responsif, profesional, akuntabel, dan berorientasi penuh pada

peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Fukuyama, M. (2018). *Society 5.0: Aiming for a new human-centered society*. Japan SPOTLIGHT.
- Grindle, M. S. (1997). *Getting good government: Capacity building in the public sectors of developing countries*. Harvard Institute for International Development.
- OECD. (2020). *The OECD digital government policy framework: Six dimensions of a digital government*. OECD Publishing.
- OECD. (2021). *The OECD framework for digital talent and skills in the public sector*. OECD Publishing.
- Osborne, S. P. (Ed.). (2010). *The new public governance: Emerging perspectives on the theory and practice of public governance*. Routledge.
- Schwab, K. (2016). *The fourth industrial revolution*. World Economic Forum.
- Dunleavy, P., Margetts, H., Bastow, S., & Tinkler, J. (2006). New public management is dead—Long live digital-era governance. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 16(3), 467–494. <https://doi.org/10.1093/jopart/mui057>
- Mergel, I., Edelmann, N., & Haug, N. (2019). Defining digital transformation: Results from expert interviews. *Government Information Quarterly*, 36(4), 101385. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2019.06.002>
- Saputra, F. O., Nadeak, B., & Nurhasanah, N. (2025). Strategi pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapabilitas birokrasi publik. *Edunomika*, 9(2).
- Sarjito, A., & Djati, S. P. (2025). Implikasi kompetensi digital Aparatur Sipil Negara milenial terhadap reformasi birokrasi digital di era transformasi pemerintahan. *Jurnal Administrasi Publik*, 21(1), 87–109.
- Sultana, S., Wahyu, Huda, A. N., Gunawan, S., & Sutadi, N. F. (2025). Transformasi pelayanan publik berbasis digitalisasi melalui e-government: Strategi peningkatan efektivitas, transparansi, dan kepuasan masyarakat di era Society 5.0.
- Vial, G. (2019). Understanding digital transformation: A review and a research agenda. *The Journal of Strategic Information Systems*, 28(2), 118–144. <https://doi.org/10.1016/j.jsis.2019.01.003>
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.